

POLITIK PEMILU 2024

Presiden: Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi Domestik

CIREBON (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, urusan politik terkait Pemilu 2024 jangan sampai mengganggu stabilitas ekonomi domestik yang telah terjaga dengan baik.

"Saya selalu menyampaikan jangan sampai urusan politik di 2024 mengganggu stabilitas ekonomi kita, karena kalau terganggu dalam posisi dunia sulit itu kadang-kadang mengembalikannya akan sangat sulit," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapiernas Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (29/8).

Menurut Jokowi, jika stabilitas ekonomi domestik terganggu di tengah situasi global yang sulit seperti saat ini, maka upaya pemulihan yang ditempuh akan banyak terkendala. Karena itu, Jokowi berpesan agar semua pihak untuk mengutamakan kinerja dalam menumbuhkan perekonomian dalam negeri dan tidak perlu tergesa-gesa soal urusan Pemilu 2024.

Jokowi menjelaskan, saat ini semua negara berada dalam posisi yang tak mudah. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa juga berada pada posisi yang sulit, baik dari pencapaian pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan harga barang untuk menjangkar inflasi. "Harga-harga semuanya membubung tinggi," ujar Jokowi.

Bahkan, kata Jokowi, ada satu negara di Eropa yang mengalami kenaikan harga komoditas energi seperti

gas, listrik, dan bensin hingga 700 persen. Jokowi membandingkan dengan kenaikan harga energi secara tipis di Indonesia, namun bisa memancing aksi demonstrasi besar. "Bayangkan naik 700 persen, di sini naik 10-15 persen demonya tiga bulan. Itu 700 persen, coba mau demo berapa tahun. Betapa sangat sulitnya, harga pangan naik dua kali, naik 50 persen," ujarnya.

Selain ke Cirebon, Presiden juga melakukan kunjungan kerja di Pekalongan, Jawa Tengah. Bahkan Presiden Joko Widodo mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto santap siang di sela kegiatan di Pekalongan.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membagikan foto-foto kegiatan Presiden santap siang bersama dalam akun Instagram @dwipayanaari.



Presiden didampingi Menhan dan Gubernur Jateng usai mengecek harga komoditas di Pasar Grogolan, Kota Pekalongan.

Menurut Ari, santap siang itu dilakukan setelah Presiden menghadiri acara Mukhtamar Sufi di Pekalongan. Pada Mukhtamar Sufi itu Ganjar hadir selaku Gubernur Jateng, sementara Prabowo Subianto selaku Ketua Panitia Mukhtamar. "Ini suasana makan siang setelah Mukhtamar (Sufi) di rumah makan Teras Bali Kota Pekalongan," kata Ari.

Usai santap siang Presiden didampingi Ibu Negara serta rombongan termasuk Ganjar dan Prabowo blusukan ke Pasar Grogolan Pekalongan untuk menyalurkan paket sembako dan mengecek harga komoditas di pasar itu. "Setiap kota, kabupaten, dan provinsi saya mengecek ke pasar mengenai harga-harga (komoditas). Di sini, semuanya baik, kecuali harga beras yang sedikit naik," kata Presiden.

Menurut Presiden, dari hasil pengecekan di pasar disebutkan hampir semua kebutuhan pokok banyak yang turun, kecuali harga beras yang sedikit mengalami kenaikan. (Ant/San)-f

PANGGUNG RAKYAT GEBYAR KEISTIMEWAAN Wayang Wisata Istimewa Semarakkan 11 Tahun UUK DIY



Pergelaran Wayang Wisata Istimewa Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo.

KULONPROGO (KR) - Memperingati 11 Tahun Undang-Undang Keistimewaan (UUK) Daerah Istimewa Yogyakarta, Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY menggelar acara bertajuk "Panggung Rakyat Gebyar Keistimewaan 11 Tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY" di Lapangan Secang, Sendangsari, Pengasih, Kulonprogo, 29-31 Agustus 2023.

Acara menampilkan Wayang Wisata Istimewa yang merupakan kreasi gabungan dari seni wayang, multimedia, dan beberapa seni khas Kabupaten Kulonprogo untuk dijadikan ikon baru. Hari berikutnya menampilkan Ketoprak Keluarga Cantrik, Panggung Rakyat dan Pasar UMKM.

Panggung Rakyat Gebyar Keistimewaan yang digelar selama tiga hari ini dimeriahkan Ngatmomobilung, Bayu Madhuswara, Nyi Ageng Etnic, Extravagangso, Cokekanz Gejok Lesung, Jaranan Maheswari, Tari Angguk, Sendang Sari Band dan Lighting Show. Kegiatan ini didanai dana keistimewaan DIY dan disiarkan live streaming melalui channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Paniradya Pati Kaistime-



Aris Eko Nugroho SP MSi

wan DIY, Aris Eko Nugroho SP MSi mengatakan, pemilihan tempat di Lapangan Secang bukan tanpa alasan. Kapanewon Pengasih merupakan salah satu kapanewon miskin yang berada di DIY. "Ini menjadi tantangan kita bersama. Diharapkan dengan adanya rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini, dapat memberikan dampak perekonomian secara langsung kepada masyarakat, dan memunculkan potensi yang dimiliki Kapanewon Pengasih ini," kata Aris saat membuka acara.

Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Kulonprogo Akhid Nuryati SE, Sekda Kabu-



Ni Made Dwipanti Indrayanti ST MT

paten Kulonprogo Triyono SIP MSi dan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon Pengasih.

Menurut Aris, saat ini pemanfaatan dana keistimewaan (danais) sudah sampai ke tingkat kalurahan, bahkan khusus di Kulonprogo ini ada lebih 900 padukahan yang memiliki event meri dusun yang didanai danais. "Kegiatan (peringatan lahirnya UUK DIY) tahun ini merupakan pertama kali diadakan di luar Kota Yogyakarta, yaitu di Kabupaten Kulonprogo. Oleh karena itu, kami berharap bapak ibu menyampaikan bahwa di sini (lapangan Secang) ada aktivitas budaya," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Aris, tahun ini event dan aktivitas yang berkaitan dengan keistimewaan DIY meningkat signifikan. Tahun lalu event dan aktivitas yang diadakan sebanyak 373 event, tahun ini (hitungan kasar) mencapai 1.064 event dan kegiatan. Khusus kegiatan meri dusun saja yang berada di Kabupaten Kulonprogo dalam satu bulan sebanyak 294 event.

"Melalui kegiatan ini diharapkan keistimewaan secara luas tetap mampu mempertahankan ruh-ruh budaya di DIY. Mohon dukungan bapak ibu semua untuk mewujudkan tujuan keistimewaan ini, sehingga apa yang diinginkan Gubernur DIY Sri Sultan HB X maupun amanah UUK dapat terselenggara dengan baik," harapnya.

Pj Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti ST MT mengapresiasi sekaligus berterima kasih kepada Pemda DIY dalam hal ini Paniradya Kaistimewan DIY berkolaborasi dengan Sekber Keistimewaan DIY yang menggelar acara ini di Kapanewon Pengasih.

"Kegiatan ini diharapkan membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi perekonomian warga setempat sekaligus pelestarian budaya lokal," katanya. (Dev/Wan)

TERAFILIASI PANJI GUMILANG Bareskrim Minta 96 Rekening Diblokir

JAKARTA (KR) - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri meminta 96 rekening bank milik Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), yang menaungi Pondok Pesantren Al-Zaytun pimpinan Panji Gumilang, diblokir. Polri telah mengirimkan surat pemblokiran terhadap puluhan rekening tersebut ke sejumlah bank dan badan hukum yang terafiliasi dengan Panji Gumilang.

"Penyidik telah mengirimkan surat blokir terhadap 96 rekening YPI, rekening badan hukum lainnya yang terafiliasi dengan saudara PG (Panji Gumilang)," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Selasa (29/8).

Pemblokiran rekening tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Selain pemblokiran rekening, penyidik juga masih mendalami keterangan saksi-saksi dan sejumlah pihak. Dari 13 saksi yang dijadwalkan diperiksa selama sepekan ini, terdapat dua saksi yang meminta penundaan pemeriksaan. "Penyidik Dittipideksus menerima surat pengunduran jadwal pemeriksaan Saudara AP dan SS," tambahnya.

Ramadhan tidak merinci atribusi AP dan SS, tapi sebelumnya penyidik menjadwalkan pemeriksaan 13 saksi dari pihak YPI dan Madrasah Al-Zaytun. Berikutnya, penyidik juga berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indramayu terkait aset milik Panji Gumilang dan keluarganya. (Ant/Has)-d

SOAL BATAS USIA CAPRES CAWAPRES MK Harus Konsisten dengan Putusan Sebelumnya

JAKARTA (KR) - Batasan usia sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan merupakan isu konstitusional. Sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) harus konsisten dengan kebijakan hukum terbuka (open legal policy).

"Batasan umur sebagai syarat capres dan cawapres bukanlah isu konstitusional, sehingga MK harus konsisten dengan keputusan-keputusannya selama ini mengenai kebijakan hukum terbuka," kata pakar hukum Bivitri Susanti dalam sidang lanjutan terkait uji material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/8).

Bivitri mengatakan, diskursus mengenai batas umur atau juga disebut dengan istilah ageism muncul dalam situasi di luar wilayah konstitusional. Hal itu, karena pembatasan usia minimum atau maksimum dari politikus tidak lazim diatur secara ketat.

"Kapasitas politik politikus, umumnya diukur dari rekam jejaknya, bukan umur. Berbagai negara, karena itu, menerapkan usia yang berbeda-beda mengenai batas umur. Sejah ini memang tidak ada pembuktian secara ilmiah mengenai pengaruh usia pada kapasitas politik dan bahkan ki-

nerja," jelasnya.

Bivitri juga menyoroti argumentasi pemohon yang menyatakan bahwa batasan usia minimum capres dan cawapres 40 tahun berkorelasi dengan ketidakadilan dan diskriminasi. Bila argumentasi pemohon demikian adanya, maka seharusnya batasan usia sama sekali dihapuskan. "Jika proposisi utamanya adalah pembatasan umur menimbulkan diskriminasi bagi sebagian warga negara Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun, maka seharusnya dalam silogisme kesimpulannya adalah menghilangkan sama sekali batasan umur, bukan menurunkannya," katanya.

Pembatasan hal-hal tertentu, menurut Bivitri, sejatinya dibolehkan secara teologis, sebagaimana telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Bahkan, Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) juga memberikan komentar serupa terkait adanya pembatasan usia tersebut, yakni pemberian batasan usia dimungkinkan bila ada penalaran yang dapat diterima. (Ant/Has)-f

PUAN PADA PARIPURNA HUT KE-78 DPR Anggota Dewan Jangan Berlebihan

JAKARTA (KR) - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung berbagai kritik yang kerap menerima anggota dewan saat menjalankan tugas, termasuk soal tingkat kehadiran dalam rapat DPR. Puan meminta agar para anggota dewan jangan sering rapat di luar urusan DPR.

"Menjadi kritik dan autokritik bagi kita bersama bahwa dalam menjalankan tugas, DPR RI harus memperhatikan sejumlah hal. Pertama, meningkatkan kehadiran anggota DPR RI dalam rapat-rapat urusan rakyat," kata Puan dalam pidatonya saat Rapat Paripurna HUT ke-78 DPR di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (29/8).

Menurut Puan, kritikan lain yang harus diperhatikan adalah terkait tindak lanjut dari hasil rapat bersama Pemerintah. Seluruh anggota DPR lebih responsif dan cekatan dalam merealisasikan rekomendasi dan kebijakan berdasarkan hasil rapat demi memenuhi kebutuhan rakyat.

"Meningkatkan atensi pada tindak lanjut dari hasil-rapat rapat bersama Pemerintah. Rekomendasi dan kesimpulan rapat jangan hanya menjadi catatan kata-kata di atas kertas," ujarnya.

Puan meminta seluruh anggota dewan untuk meningkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada rakyat atas apa yang telah dikerjakan oleh DPR RI. Partisipasi publik dalam menyusun undang-undang semakin ditingkatkan. Selain itu, anggota DPR diingatkan untuk meningkatkan disiplin dalam menjaga kehormatan sesuai kedudukan DPR RI. (Ant/Has)-f



TRADISI MANTEN TEMBAKAU: Sejumlah warga mengusung gunung hasil bumi saat tradisi Manten Tembakau di sendang Piwakan, kawasan lereng Gunung Sumbing Dusun Gopaan, Genito, Windusari, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (29/8/2023). Tradisi Manten Tembakau rutin dilaksanakan setiap hari Selasa Pahing di sendang penangalan Jawa sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan kepada Tuhan agar mendapat kesuksesan dan kelancaran terutama untuk pertanian tembakau.

KEBIJAKAN BERORIENTASI MASYARAKAT BANYAK Anies Tak Khawatir Dukungan Parlemen Lemah

DEPOK (KR) - Bakal Calon Presiden RI Anies Rasyid Baswedan mengaku tidak khawatir dukungan parlemen lemah jika terpilih menjadi presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Ketika kebijakan berorientasi pada masyarakat banyak, Pemerintah bisa mengkomunikasikan kepada publik dan meminta dukungan publik karena untuk kepentingan masyarakat.

Anies Baswedan mengemukakan hal itu ketika menanggapi pertanyaan dari mahasiswa UI yang menanyakan bagaimana dukungan parlemen yang lemah dan akan menyulitkan dalam mengambil kebijakan bagi seorang pemimpin. "Kekuatan proposal kebijakan ada pada kontennya," kata Anies Baswedan dalam acara kuliah kebangsaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Depok Jawa Barat, Selasa (29/8).

Anies menceritakan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Partai yang mendukungnya hanya dua partai dari sembilan partai yang ada di DPRD Provinsi DKI Jakarta. "Apa yang terjadi

persuasi sampaikan gagasan, argumen dibangun, data-data dikumpulkan, dan ini menjadi kekuatan bahwa kepentingan umum menjadi yang terbesar," katanya.

Jika kebijakannya tidak ada kepentingan umum dan partisan, menurut Anies, perlu otot politik yang kuat untuk menjalankan kebijakan tersebut. Pasaunya, kalau tidak pakai otot politik, kebijakan ini tak bisa jalan. "Jika tidak mempunyai data, tak ada scientific, dan tak berpihak pada masyarakat, maka sulit berjalan," tegasnya.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar kuliah kebangsaan bagi tiga putra terbaik bangsa Indonesia. Ketiganya adalah Anies Rasyid Baswedan (Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022), Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan), dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah).

Untuk pertama, pihak FISIP UI menghadirkan Anies Rasyid Baswedan pada hari Selasa (29/8) pukul 08.00 hingga 11.30 WIB. Selanjutnya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang akan ditentukan waktunya. (Ant/Has)-f